

Pemerataan Pendidikan melalui Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di Sekolah SMAN 1 Hu'u dan SMK Negeri 1 Hu'u Kabupaten Dompu

Qurban Hajar, Nursidrati*, Edi Firmasyah, Baharudin, Rizka Awaluddin
STKIP Al Amin Dompu, Indonesia

*Corresponding Author: nursidrati@gmail.com

Dikirim: 12-06-2024; Direvisi: 16-06-2024; Diterima: 17-06-2024

Abstrak: Tujuan dari dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan atau implementasi dari kebijakan sistem zonasi PPDB yang menjadi salah satu upaya dalam pemerataan pendidikan pada sekolah menengah atas di wilayah kecamatan Hu'u kabupaten Dompu. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Hu'u dan SMK Negeri 1 Hu'u. Untuk memperoleh data yang diinginkan, peneliti melakukan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Dalam menganalisis data yang telah diperoleh, peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yaitu mereduksi data, menyajikan data dan melakukan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik sebagai uji keabsahan data. Hasil penelitian yang diperoleh adalah : 1) terpenuhinya enam variabel Van Meter dan Van Horn dalam implementasi kebijakan sistem zonasi yaitu sebagai berikut : a) Aturan Kepala Disdikpora tentang Juknis Pelaksanaan PPDB SMA/SMK Negeri menjadi standar dan tujuan dari implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB SMA/SMK negeri. Namun, kebanyakan masyarakat ataupun wali murid kurang memahami isi peraturan tersebut. b) segala hal yang diperlukan dalam implementasi kebijakan ini sudah terpenuhi atau tercukupi melalui adanya panitia PPDB yaitu guru, karyawan dan OSIS, serta sarana prasarana yang mendukung; c) komunikasi antar pelaksana sistem zonasi PPDB di SMA Negeri 1 Hu'u dan SMK Negeri 1 Hu'u serta Disdikpora berjalan dengan lancar melalui adanya sosialisasi baik secara langsung maupun melalui grup *whatsapp* ataupun grup *line*; d) Dalam pengimplementasian sistem zonasi tidak semua berdasarkan zona daerah siswa, melainkan perengkingan dari hasil nilai UNBK; e) perlunya perbaikan dalam sistem zonasi; dan f) kondisi ekonomi di lingkungan SMA Negeri 1 Hu'u dan SMK Negeri 1 Hu'u rata-rata petani. 2) Dampak positif dari implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA N 1 Hu'u dan SMK N 1 Hu'u yaitu input peserta didik pada sekolah tersebut merata dan meningkatnya motivasi belajar di sekolah favorit, sedangkan untuk dampak negatifnya yaitu bisa berpengaruh terhadap kehidupan sosial peserta didik dan kesenjangan sosial.

Kata Kunci: Pemerataan Pendidikan, Implementasi Kebijakan, Sistem Zonasi

Abstract: The purpose of this research is to find out how the PPDB zoning system policy is implemented or implemented, which is one of the efforts to equalize education in high schools in the Hu'u sub-district, Dompu district. The type of research used is descriptive qualitative research. This research was conducted at SMA Negeri 1 Hu'u and SMK Negeri 1 Hu'u. To obtain the desired data, researchers conducted observations, interviews and documentation studies. In analyzing the data that has been obtained, researchers use the Miles and Huberman model, namely reducing data, presenting data and drawing conclusions by triangulating sources and triangulating techniques as a test of data validity. The research results obtained are: 1) the fulfillment of the six Van Meter and Van Horn variables in the implementation of the zoning system policy, namely as follows: a) Regulations from the Head of the Education and Sports Department regarding technical guidelines for the implementation of State High School/Vocational School PPDB become the standards and

objectives of implementing the SMA/SMK PPDB zoning system policy state vocational school. However, most people or parents do not understand the contents of these regulations. b) everything needed to implement this policy has been fulfilled or fulfilled through the existence of the PPDB committee, namely teachers, employees and OSIS, as well as supporting infrastructure; c) communication between implementers of the PPDB zoning system at SMA Negeri 1 Hu'u and SMK Negeri 1 Hu'u as well as Disdikpora runs smoothly through socialization both directly and via WhatsApp groups or line groups; d) In implementing the zoning system, it is not all based on the student's regional zone but instead uses the UNBK results grades which are sorted using ranking; e) The disposition of the implementer supports the zoning system but needs to be improved in the system; and f) the economic conditions in SMA Negeri 1 Hu'u, the average student's parents work as entrepreneurs, while in SMA Negeri 1 Hu'u the average is farmers and laborers. 2) The positive impact of implementing the zoning system policy at SMA N 1 Hu'u and SMK N 1 Hu'u is that student input at these schools is even and increases motivation to study at favorite schools, while the negative impact is that it can affect the lives of social participants. raised and equated with social.

Keywords: Equal Education, Policy Implementation, Zoning System

PENDAHULUAN

Proses pendidikan yang bermutu merupakan tujuan utama penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pemerintah telah merumuskan beberapa kebijakan pendidikan dengan tujuan untuk memperbaiki mutu pendidikan Indonesia. Kebijakan mengenai peningkatan mutu pendidikan telah lama diwujudkan dalam bentuk konstitusi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 11 menunjukkan tentang keinginan pemerintah untuk dapat menyelenggarakan pendidikan bermutu. Pemerintah selalu memperhatikan kebijakan pendidikan guna menjamin mutu pendidikan masyarakat yang diselenggarakan demi tercapainya tujuan bersama.

Berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia telah dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Namun, beberapa permasalahan pendidikan saat ini masih ditangani dan diusahakan oleh pemerintah untuk pemecahan masalah tersebut. Salah satu masalah dalam memajukan mutu pendidikan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yaitu permasalahan pemerataan untuk memperoleh akses pendidikan (Astomo, 2021; I Made Candiasa, 2013). Masalah pemerataan pendidikan tidak akan pernah habis untuk dibicarakan karena Indonesia terdiri dari gugusan pulau dan persebaran letak geografis yang tidak merata. Kondisi letak geografis penduduk Indonesia yang tersebar pada setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda. Hal ini menyebabkan penyebaran mutu pada pemerataan pendidikan yang kurang merata.

Berawal dari sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dari sinilah muncul kesenjangan sosial yang terjadi akibat input penerimaan siswa baru dengan kriteria tertentu pada sebuah sekolah berlabel favorit tersebut. Beberapa kriteria tersebut seperti yang telah tercantum di atas. Pada dasarnya, peraturan mengenai penerimaan siswa baru telah tercantum dalam Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Guna mewujudkan mutu pendidikan melalui pemerataan pendidikan, saat ini pemerintah telah membuat kebijakan mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan program disebut sebagai "Sistem Zonasi". Program ini telah tercantum dalam Permendikbud No. 51 Tahun 2018 pasal 16 yang menyebutkan bahwa pendaftaran penerimaan peserta didik baru dapat



dilakukan melalui tiga jalur pertama jalur Zonasi, kedua jalur Prestasi, dan jalur Perpindahan tugas orang tua/wali. Pada jalur zonasi harus memenuhi paling sedikit 90% dari daya tampung sekolah, dan 5% untuk jalur prestasi, sedangkan 5% sisanya untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

Sistem zonasi sendiri adalah suatu sistem dimana sekolah harus menerima peserta didik yang memiliki radius tempat tinggal terdekat dengan sekolah (Datuk, 2020; Widyaningtyas dkk, 2021; Madiana et al., 2022). Fokus utama pada kebijakan zonasi ini merupakan upaya pemerintah dalam pemerataan akses layanan pendidikan sekaligus pemerataan kualitas pendidikan bagi seluruh warga Negara Indonesia (Mallevi et al., 2022; Ningrum, 2022). Pemerintah menetapkan kebijakan sistem zonasi dengan harapan dapat menjadi jembatan untuk membangun dan memperbaiki sistem pemerataan pendidikan di Indonesia. Adanya sistem zonasi akan melebur sekolah-sekolah yang memiliki label favorit.

Beberapa alasan mengenai penghapusan label sekolah favorit adalah adanya sekolah favorit yang akan menggusur sekolah pinggiran dengan input peserta didik yang seadanya atau bisa dibidang buangan dari calon peserta didik baru yang telah ditolak pada saat mendaftar ke sekolah favorit dengan alasan tidak memenuhi persyaratan dan persaingan yang sangat ketat. "Sekolah Pinggiran" biasanya memiliki animo pendaftaran peserta didik baru yang rendah. Hal itu disebabkan beberapa faktor yang menjadi pemicu seperti keberadaan sekolah yang terletak dipinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai dan masih mengandalkan sistem model pembelajaran yang lama tanpa adanya kemandirian peserta didik (Wahyono et al., 2014). Jika tidak segera ditindaklanjuti, sekolah favorit akan selamanya menjadi favorit calon peserta didik maupun masyarakat pada umumnya karena mulai dari input peserta didik baru, guru, sarana prasarana dan hal-hal pendukung lainnya selalu terbaik di setiap tahun. Lalu "sekolah pinggiran" akan selamanya menjadi sekolah pinggiran yang dinomorsekiankan oleh masyarakat karena dipandang rendah dengan kualitas guru, sarana prasarana, dan hal-hal lainnya yang kurang baik.

Hal ini relevan dengan penelitian Pöder et al., (2016) yang menjelaskan bahwa secara tradisional beberapa kota di Eropa sebenarnya telah terlebih dahulu sudah memberlakukan kebijakan sistem zonasi pada anak didik sekolah. Area tempat tinggal akan menentukan kemana seorang anak akan masuk ke sekolah. Sekolah yang mengacu pada daerah lingkungan tempat tinggal seorang anak didik ini secara luas dianggap peraturan terbaik untuk pemerataan pendidikan. Kebijakan tersebut masih diberlakukan hingga saat ini pada beberapa kota di Eropa seperti Estonia, Finlandia, dan Swedia. Namun, dalam praktiknya beberapa dekade terakhir ini sudah mulai rusak dan terdapat beberapa masalah dalam penyelenggaraannya. Salah satunya yaitu orang tua sudah mulai cerdas untuk menghindari keharusan geografis tempat tinggal yang dipaksakan agar seorang anak dapat sekolah di tempat lain. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan sistem zonasi di Eropa yang sudah diterapkan sejak lama justru semakin kedepan dapat terjadi kecurangan dalam pemindahan tempat tinggal seorang anak sesuai dengan keinginan orang tuanya agar dapat sekolah di tempat yang diinginkan. Lalu bagaimana dengan dampak dari pemberlakuan sistem zonasi yang diterapkan di Indonesia baru-baru ini, apakah ke depannya juga akan mengalami hal yang sama sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa (Pöder et al., 2016).



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan hasil temua tentang penerapan dari kebijakan sistem zonasi pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di kecamatan Hu'u. Penelitian ini dilaksanakan pada jenjang SMA di Kecamatan Hu'u. Diambil dari sampel sekolah favorit dan sekolah yang berada di pelosok desa. Sekolah favorit tersebut yaitu SMA Negeri 1 Hu'u yang terletak di Jl. Lakey Desa Adu. SMA Negeri 1 Hu'u merupakan salah satu sekolah bergengsi dan favorit di Kecamatan Hu'u. Hal itu dapat dibuktikan dengan animo PPDB yang selalu membludak dan juga prestasi-prestasi yang telah diraih oleh sekolah ini. Penelitian ini juga dilaksanakan di SMK Negeri 1 Hu'u.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini yaitu mengetahui pemerataan pendidikan melalui implementasi kebijakan sistem zonasi sekolah menengah atas di kecamatan Hu'u kabupaten Dompu serta mengetahui adanya dampak positif dan dampak negatif dari implementasi sistem zonasi sebagai upaya pemerataan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di kecamatan Hu'u. Penelitian implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB ini dilakukan di SMA Negeri 1 Hu'u sebagai sekolah favorit yang terletak di Kecamatan Hu'u dan SMK Negeri 1 Hu'u

Hasil observasi yang telah dilakukan pada hari Rabu, 5 Juni 2024 pukul 09:30 WITA di SMA Negeri 1 Hu'u menunjukkan aktivitas PPDB yang sedang berlangsung pengambilan token di sekolah tersebut. Terlihat banyak calon peserta didik baru yang menggunakan seragam SMP ataupun pakaian bebas ditemani orang tua atau walinya yang sedang menunggu dipanggil dan mengantri untuk pengambilan nomor token. Mereka diarahkan oleh OSIS yang menggunakan jas almamater sekolah dan dilayani oleh sekumpulan panitia yaitu guru dan karyawan di dalam aula SMA Negeri 1 Hu'u untuk pengumpulan berkas pengambilan token.

Setiap panitia yang telah terbentuk dalam satuan sekolah dan calon peserta didik baru juga selalu menjaga komunikasi antarpelaksana PPDB sistem zonasi. Implementasi sistem zonasi dalam PPDB dibutuhkan komunikasi yang baik untuk menyampaikan maupun mencari informasi yang dibutuhkan. Komunikasi yang terjalin antardua pihak tersebut berjalan lancar dengan penyelenggaraan sosialisasi dan adanya grup whatsapp.

Pembahasan

Pemerataan pendidikan melalui implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 1 Hu'u dan SMK Negeri 1 Hu'u dalam penelitian ini mengacu pada teori implementasi Van Meter dan Van Horn dengan enam variabel yang ada. Ke enam variabel tersebut antara lain standar dan tujuan; sumber daya; komunikasi antar organisasi; karakteristik agen pelaksana; disposisi implementor; serta kondisi ekonomi dan sosial (Agusman, 2019; Purwitasari, 2012; Amalia dkk, 2024).

Pembagian jalur PPDB masih sama dengan adanya tiga jalur yaitu zonasi, prestasi dan perpindahan tugas orang tua/wali. Namun peraturan tersebut telah direvisi oleh Kemendikbud menjadi Permendikbud No. 20 Tahun 2019 Pasal 16 (2)



yang menyebutkan bahwa daya tampung sekolah pada jalur zonasi menjadi paling sedikit 80% dan Pasal 16 (3) pada jalur prestasi menjadi 5% sampai 15%.

PPDB SMA di kecamatan Hu'u tetap menerapkan peraturan lama dengan porsi 90% jalur zonasi, 5% jalur prestasi, dan 5% jalur perpindahan orang tua. Khususnya peraturan di Kecamatan Hu'u ini dalam implementasi kebijakan sistem zonasi tidak murni secara penuh menggunakan zona daerah sebagai penentuan peserta didik tersebut untuk dapat mendaftarkan diri ke suatu sekolah, melainkan tetap menggunakan nilai hasil UNBK. Nilai UNBK tersebut diurutkan menggunakan ranking dari nilai yang teratas. Meskipun ada peserta didik dalam satu zona tetapi nilainya lebih rendah dari peserta didik lain, maka peserta didik tersebut tidak dapat masuk ke sekolah yang daftarkannya.

Dampak Positif Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi

Kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di Wilaya Kecamatan Hu'u membawa dampak positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini menjadikan input peserta didik di setiap sekolah menjadi rata tanpa ada diskriminasi. Sesuai dengan tujuan PPDB sistem zonasi untuk meningkatkan akses layanan pendidikan seperti yang tercantum pada Permendikbud No. 51 Tahun 2018 Pasal 3. Implementasi PPDB di Wilaya Kecamatan Hu'u khususnya di SMA Negeri 1 Hu'u dengan adanya sistem zonasi membuat sekolah tersebut memberikan kesempatan bagi semua peserta didik yang berada dalam zona yang telah ditentukan untuk dapat masuk ke sekolah tersebut walaupun memiliki nilai yang kurang tinggi seperti biasanya. Begitu pula dengan SMK Negeri 1 Hu'u, dengan adanya implementasi PPDB sistem zonasi, sekolah ini mendapatkan siswa dengan nilai tertinggi mencapai 293. Sebelum adanya zonasi, nilai tertinggi sekolah ini hanya di bawah 150 saja.

Selain input peserta didik, dampak positif dari implementasi sistem zonasi yaitu pada motivasi belajar dan berprestasi peserta didik. Peserta didik yang dapat masuk ke sekolah favorit dengan jalur zonasi semakin memacu semangat belajarnya untuk dapat bersaing dengan teman-temannya yang bisa mendapatkan prestasi di sekolah tersebut.

Dampak Negatif Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi

Implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB di Wilaya Kecamatan Hu'u juga berdampak negatif terhadap peserta didik. Hal ini berpengaruh terhadap keadaan sosial peserta didik yang bisa berubah sesuai dengan kondisi lingkungan sekolahnya. Jika anak yang berasal dari sekolah favorit sudah terbiasa dengan hidup rajin dan disiplin untuk mencari ilmu dan anak yang berasal dari sekolah pinggiran yang terbiasa untuk santai dan suka bermain itu dicampur di satu lingkungan sekolah pinggiran, maka hal yang dikhawatirkan oleh orang tua peserta didik bahwa anaknya bisa terkena dampak lingkungan yang kurang disiplin tersebut. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa peserta didik yang berasal dari sekolah favorit sudah mulai tertarik untuk belajar santai seperti teman-teman kelasnya. Hal ini akan mempengaruhi motivasi belajar dan motivasi berprestasi siswa.

Selain dampak lingkungan yang mempengaruhi motivasi belajar, adanya sistem zonasi juga berpengaruh terhadap kesenjangan sosial antara kakak kelas yang masuk ke sekolah favorit itu dengan berjuang untuk mendapatkan nilai tinggi merasakan ketidakadilan ketika adik kelasnya dapat masuk ke sekolah favorit tersebut hanya dengan jalur zonasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi



kesenjangan sosial pada dunia pendidikan diantaranya rendahnya kualitas atau persediaan sarana dan prasarana sekolah, kualitas guru yang rendah, faktor infrastruktur, jumlah dan kualitas buku sebagai referensi belajar peserta didik di sekolah, mahalny biaya pendidikan, dan standardisasi pendidikan (Hidayat, 2017). Beberapa faktor tersebut menjadi kesenjangan antara sekolah favorit dan sekolah pinggiran, sehingga menimbulkan ketidakadilan perlakuan kakak kelas kepada adik kelas yang bisa masuk ke sekolah favorit tanpa menggunakan jalur prestasi.

Hal ini sesuai dengan Teori Maslow “Hierarchy of Needs” pada level ketiga yaitu Belonging and Love Needs. Maslow percaya bahwa motivasi akan tumbuh dengan adanya rasa memiliki dan mencintai. Motivasi akan tumbuh dengan adanya kasih sayang dan dukungan dari lingkungan yang saling memiliki. Setelah itu adanya level Esteem Needs dimana orang akan merasa percaya diri ketika dihargai oleh lingkungannya. Dan pada level terakhir adalah Self-actualization. Di saat ini lah orang akan dapat mengaktualisasikan dirinya jika telah mendapatkan dukungan, merasa dicintai dan dihargai oleh lingkungannya. Pada saat ini lah peserta didik dapat mencapai prestasinya (Medcalf et al., 2013).

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas, secara umum pemerataan pendidikan melalui implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 1 Hu’u dan SMK Negeri 1 Hu’u telah berjalan lancar dan memenuhi enam variabel menurut Van Meter dan Van Horn yaitu terdapat variabel standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarpelaksana, karakteristik pelaksana, disposisi implementor, serta kondisi ekonomi dan sosial dalam implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB di Wilaya Kecamatan Hu’u. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan di Indonesia. Sumber daya dalam implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB ini yaitu sumber daya manusia dimana panitia pelaksana PPDB merupakan guru, karyawan, dan dibantu OSIS, serta kebutuhan sarana prasarana penunjang implementasi kebijakan ini. Komunikasi antarpelaksana implementasi sistem zonasi berjalan dengan lancar melalui tatap muka seperti pengadaa sosialisasi maupun menggunakan media yaitu adanya grup whatsapp dan line. Karakteristik pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB di Wilaya Kecamatan Hu’u ini menerapkan Permendikbud yang lama dengan adanya tiga jalur masing-masing presentase yaitu jalur zonasi 90%, jalur prestasi 5%, dan jalur perpindahan orang tua 5%. Akan tetapi, Disdikpora Kabupateen Dompu tetap menerapkan sistem penyaringan peserta didik dengan menggunakan ranking nilai UNBK dari yang tertinggi hingga terendah untuk masuk ke suatu sekolah. Disposisi implementor menunjukkan sikap pelaksana kebijakan ini menerima adanya sistem zonasi, namun perlu adanya perbaikan sistem lainnya terlebih dahulu sebelum memperbaiki sistem input siswa. Kondisi ekonomi dan kondisi sosial antara SMA Negeri 1 Hu’u dan SMK Negeri 1 Hu’u sangat berbeda karena letak geografis mereka yang berbeda mempengaruhi jenis pendapatan orang tua wali dan juga kultur lingkungan sosialnya.

Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di Wilaya Kecamatan Hu’u ini menimbulkan dampak positif dan dampak negatif dalam pelaksanaannya. Dampak positif dari kebijakan ini yaitu meratanya akses pendidikan melalui pemerataan input siswa dan meningkatnya motivasi peserta didik yang dapat masuk ke sekolah favorit untuk dapat bersaing dengan teman-teman yang berprestasi.



Namun, dampak negatifnya yaitu pengaruh lingkungan buruk dari sekolah pinggiran dan adanya kesenjangan sosial di sekolah favorit.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusman, Y. (2019). Implementasi Program Indonesia Pintar di Sekolah Dasar Negeri 1 Kolakaasi Kabupaten Kolaka. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 105-113.
- Amalia, D., Rochim, A. I., & Rahmadanik, D. (2024). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) guna Menunjang Pembangunan di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)*, 4(02), 125-131.
- Astomo, P. (2021). Politik Hukum Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional Yang Responsif Di Era Globalisasi. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(2), 172-183.
- Datuk, A. (2020). Sistem Zonasi Sebagai Solusi Bagi Orang Tua untuk Mendapatkan Pendidikan Anak yang Bermutu di Kota Kupang. *Attractive: Innovative Education Journal*, 2(2), 20-33.
- Hidayat, A. (2017). Kesenjangan Sosial Pendidikan Sebagai Pengaruh Era Globalisasi. *Jurnal Justisi Hukum*, 2(1), 15–25.
- I Made Candiasa, D. (2013). Pemerataan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Komunitas Guru Online. *Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1), 118–127.
- Madiana, I., Alqadri, B., Sumardi, L., & Mustari, M. (2022). Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi serta Dampaknya terhadap Kesetaraan Hak Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(2c), 735–740. <https://doi.org/10.29303/jipp.v7i2c.633>
- Mallevi Agustin Ningrum, Suryanti, W. (2022). *Jurnal Cakrawala Pendas PENDIDIKAN Abstrak Pendahuluan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 C ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat 1 pendidikan yang bermutu* (. 8(3), 932–940.
- Medcalf, N. A., Hoffman, T. J., & Boatwright, C. (2013). Children’s Dreams Viewed Through The Prism of Maslow’s Hierarchy of Needs. *Early Child Development and Care*, 183(9), 1324–1338. <https://doi.org/10.1080/03004430.2012.728211>
- Ningrum, M. A. (2022). Penerapan Sistem Zonasi Kebijakan Baru Berdasarkan Perspektif Orangtua Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 8(3), 932-940.
- Põder, K., Lauri, T., & Veski, A. (2016). Does School Admission by Zoning Affect Educational Inequality? A Study of Family Background Effect in Estonia , Finland , and Sweden Does School Admission by Zoning Affect Educational Inequality? A. *Taylor and Francis Group*, 3831(June). <https://doi.org/10.1080/00313831.2016.1173094>
- Purwitasari, A. Y. (2012). *Implementasi Kebijakan Program Jampersal Di Kabupaten Lebak Propinsi Banten Tahun 2011*. 1–141.



- Wahyono, S. B., Hardianto, D., & Agung, A. (2014). Model Pengembangan Belajar untuk Meningkatkan Etos Belajar Siswa Sekolah Menengah di Daerah Pinggiran Provinsi DIY. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 7(1), 94–103.
- Widyaningtyas, A., Nugraha, N., & Sari, S. D. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi. *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 1(1), 29-37.

